

PROFIL LITERASI POLITIK MASYARAKAT PROVINSI BENGKULU (Studi Analisis di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kepahiang)

Oleh:

Aries Munandar¹

Harmiati²

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan literasi politik masyarakat Provinsi Bengkulu, serta untuk memahami peran KPU dalam konteks keadaan literasi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, untuk mengungkap fenomena berkenaan dengan literasi politik berdasarkan dokumen hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan KPU Kabupaten Kepahiang serta keterangan informan dari KPU Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keadaan literasi politik di Provinsi Bengkulu masih sangat terbatas hanya pada literasi yang berkaitan dengan proses kepemiluan saja dan belum mencerminkan edukasi yang berorientasi pada penguatan sistem pemahaman dan aktualisasi hak dan kewajiban warga negara. Edukasi politik baru dilakukan oleh KPU melalui kegiatan sosialisasi, bintek dan pendidikan pemilih yang dilaksanakannya dalam rangka agenda tahapan pemilu yang akan digelarnya selaku penyelenggara pemilu. Negara belum memiliki program edukasi untuk peningkatan literasi politik yang sistemik dan berkelanjutan. Kekecewaan masyarakat pemilih terhadap sikap dan kinerja pemimpin dan wakil rakyat hasil pemilihan umum menimbulkan fenomena anomali dimana masyarakat diketahui memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik namun hal itu tidak konsisten dengan sikap dan perilakunya. Dalam edukasi politik KPU berperan dalam menyampaikan informasi tentang *event* pemilu yang diselenggarakannya dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang hanya terbatas pada konteks kepemiluan saja untuk kepentingan peningkatan prosentase *voters turned out* dan penurunan prosentase suara tidak sah.

Kata Kunci: *literasi politik, pengetahuan politik, pemahaman masyarakat, Provinsi Bengkulu*

¹ Komisioner KPU Provinsi Bengkulu

² Dosen Fisip dan Ketua Pusat Studi ASEAN Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu

A. Pendahuluan

Bagi negara demokrasi, literasi politik warga negara menjadi hal yang fundamental karena semakin tinggi tingkat literasi politik warga suatu negara, maka akan semakin berkualitas pula pelaksanaan demokrasi di negara tersebut. Dalam pandangan umum tingkat literasi politik sering dikaitkan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pandangan ini mereduksi makna dari literasi politik itu sendiri, menjadi hal-hal yang hanya berkaitan dengan kepelembagaan saja. Padahal seharusnya literasi politik mencakup arti yang sangat luas karena menyangkut perangkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran warga negara tentang kedudukannya dalam sistem politik dan penyelenggaraan negara, termasuk kesadaran tentang rasa kebangsaan, konsekuensi antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga profil literasi politik masyarakat di suatu negara sangat menentukan profil demokrasi di negara tersebut.

Apabila literasi politik hanya dilihat dari tingkat partisipasi pada saat pemilu saja, maka tingkat literasi politik masyarakat Bengkulu masih berada pada tingkat yang dapat dinilai membanggakan. Dengan angka partisipasi pemilih sebesar 79 % pada Pemilu Legislatif 2014 dan masih berkisar di atas 76 % pada saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan data yang dirilis oleh KPU, keadaan di provinsi Bengkulu masih berada di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 75 % dan 71 %. Namun apabila angka tersebut direlasikan dengan isu vote buying atau pragmatisme transaksional yang banyak merebak di daerah, maka teridentifikasi tentang adanya masalah dalam pola kehidupan berdemokrasi masyarakat. Kemunculan beberapa spanduk di beberapa perkampungan warga yang bertuliskan : “Kami Siap Menunggu Serangan Fajar” atau “Ambil Uangnya, Jangan Pilih Orangnya” menegaskan kembali bahwa orientasi sosiologis pemilih dalam pemilu belum berada pada konteks yang semestinya.

Gejala ini semakin mengemuka dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat cenderung permisif terhadap fenomena money politik (KPU Kabupaten Seluma, 2015; KPU Kabupaten Bengkulu

Tengah 2015; KPU Kota Bengkulu Tahun 2015). Pada beberapa penelitian lain bahkan ditemukan gejala respon masyarakat yang menyatakan bahwa pragmatisme transaksional tersebut merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh para kontestan pemilu (baca: Caleg) untuk mendapatkan suara pemilih (KPU Kabupaten Bengkulu Utara, 2015; KPU Kabupaten Kaur 2015).

Secara teoritis, pemilu adalah momentum bagi masyarakat untuk menunjukkan kedaulatan dengan menentukan pilihannya pada kontestan pemilu yang dianggapnya paling mampu untuk menjadi wakil rakyat atau pimpinan lembaga pemerintahan menuju keadaan yang lebih sejahtera masyarakat tersebut. Namun apabila pilihan tersebut ternyata lebih ditentukan oleh orientasi transaksional, maka secara tidak langsung menunjukkan bahwa masyarakat mengabaikan atau bahkan tidak mengetahui ‘makna’ dari ‘suara’ yang sudah mereka berikan dalam pemilu. Fenomena ini menunjukkan tentang adanya gejala ‘gagal faham’ masyarakat terhadap momentum pemilu. Hal ini juga menegaskan tentang masih adanya masalah pada literasi politik masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan penelitian, yaitu: (1) Bagaimana keadaan literasi politik masyarakat Provinsi Bengkulu? dan (2) Bagaimana peran KPU dalam konteks keadaan literasi politik tersebut?

B. Landasan Teori

1. Literasi dan Literasi Politik

Dalam situs wikipedia (www.wikipedia.org), terminologi literasi secara tradisional didefinisikan sebagai kemampuan untuk membaca, menulis dan berhitung. Dalam pengertian modernnya, istilah ini mengalami perluasan makna menjadi kemampuan untuk menggunakan bahasa, angka-angka, gambar-gambar, peralatan komputer dan cara-cara yang mendasar untuk memahami, mengkomunikasikan; membentuk pengetahuan yang berguna dan menggunakan aturan-aturan yang ada di dalam sebuah sistem kebudayaan. Definisi tersebut menggambarkan bahwa literasi berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan seseorang. Literasi merujuk pada pertalian antara kemampuan yang ‘dikuasai’ oleh

seseorang secara personal dengan sebuah sistem lingkungan dimana ia akan mengaktualisasikan kemampuan itu baik secara fisik maupun sosial. Sehingga literasi dapat diidentifikasi dari sejauhmana seseorang mengetahui dan memahami sebuah konteks tertentu. Dan dapat juga dilihat dari bagaimana ia mengaktualisasikan pengetahuan dan pemahaman itu pada kehidupan nyata.

Dengan merujuk pada definisi literasi diatas, penulis mendefinisikan literasi politik sebagai seperangkat pengetahuan dan pemahaman seseorang dan masyarakat tentang politik berikut kemampuan dan wujud yang ditunjukkannya secara nyata dalam suatu system politik yang berlaku dilingkungkannya. Tingkat literasi politik dipahami juga sebagai tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman dan sekaligus aksi aktualisasi yang ia lakukan berkaitan dengan kehidupan politik diri dan lingkungannya.

Menurut Bochel, 2008 (sebagaimana dikutip dalam Laporan Riset KPU Kepahiang, 2015), literasi politik berkaitan dengan agenda yang luas karena melingkupi segala pengetahuan warga dalam mempersiapkan diri untuk ikut mengatasi konflik, resolusi konflik, keputusan ekonomi dan social, bahkan kemampuan warga untuk menjalankan hak dan tanggungjawab sebagai warganegara. *“Like all abstract concepts, political literacy cannot be measured directly, but we presume that if people are politically literate, they understand party differences and know basic political concepts and facts”* (Cassel & Lo, 1997 sebagaimana dikutip dalam Laporan Riset KPU Bengkulu Selatan, 2015). Lebih jauh, KPU Bengkulu Selatan juga mengutip Bernard Crick yang melihat bahwa political literacy menyangkut juga pemahaman tentang konsep-konsep, even-even, serta hak-hak politik yang berlangsung di dalam kehidupan sehari-hari.

2. Aspek-aspek dalam Literasi Politik

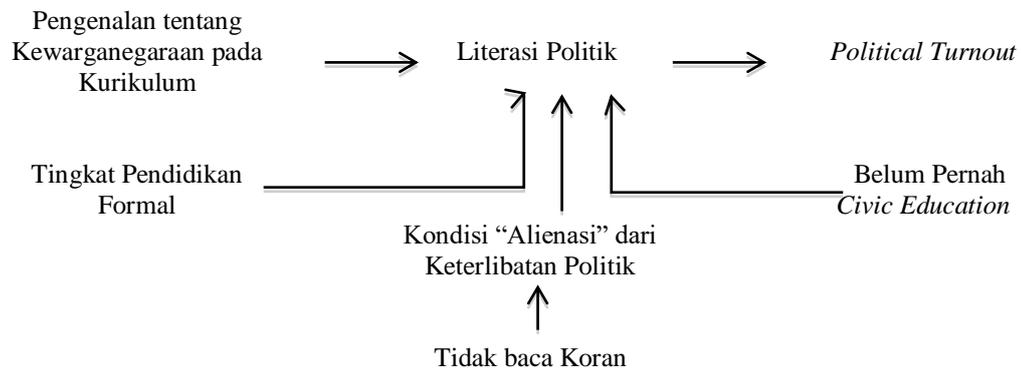
Berdasarkan hasil penelaahannya, secara teknis umum KPU Kabupaten Bengkulu Selatan menyimpulkan bahwa: ‘tingkat literasi politik warga negara adalah kecerdasan warga negara terhadap hak dan kewajiban dalam berpolitik yang tercermin dari pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilakunya’. Sehingga

indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat literasi politik warga negara adalah: (1) Pengetahuan warganegara tentang hak dan kewajiban politiknya sebagai warganegara, (2) Pemahaman warganegara tentang: jaminan hak politik dan penegakannya, dan (3) Sikap dan perilaku warganegara dalam partisipasi politik. Dalam kerangka risetnya, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan (2015) menyatakan bahwa literasi politik seseorang dan atau masyarakat dapat diukur dari Aksesibilitas Informasi, Tingkat Mobilitas, Sosialisasi Pemilu dan Tingkat Pendidikannya.

Bochel (2008) yang dikutip dari Laporan KPU Kepahiang (2015) mengindikasikan bahwa literasi politik teraktualisasi ketika warganegara aktif dalam mengatasi persoalan sosial dan ekonomi. Bagi Bochel, pendidikan yang efektif untuk warga Negara setidaknya menyangkut tiga hal, yaitu (i) tanggungjawab sosial dan moral; (ii) keterlibatan komunitas; (iii) literasi politik.

Menurut studi literature dalam Laporan KPU Kepahiang (2015) digambarkan bahwa model literasi dan partisipasi politik membentuk sketsa seperti bagan berikut:

Gambar 1. Sketsa Civic Education, Literasi Politik dan Political Turnout



Sumber: Laporan Penelitian KPU Kepahiang, 2015

Lebih jauh dijelaskan oleh Oleh KPU Kepahiang (2015), bahwa alienasi politik yang dialami oleh masyarakat pemilih di Indonesia (terutama yang berpendidikan menengah bawah ke bawah), kesibukan Parpol dan Caleg yang melakukan *lobby* kepada para 'calo' dan kartel politik melahirkan fenomena yang disebut oleh Dahnil Anzar (2014, dalam KPU Kepahiang, 2015) sebagai dinasti rente. Hal ini menurut KPU Kepahiang tidak hanya menjelaskan tentang rendahnya literasi politik, tetapi juga absennya interkoneksi antara :rakyat pemilih, para calon wakil/wakil rakyat, dan partai politik.

C. Metode Penelitian

Desain penelitian kualitatif – deskriptif untuk mengungkap fenomena tentang literasi politik berdasarkan dokumen hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan KPU Kabupaten Kepahiang serta keterangan informan dari KPU Provinsi Bengkulu. Data diolah melalui proses studi dokumen dari kedua dokumen laporan hasil penelitian KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, laporan hasil penelitian KPU Kabupaten Kepahiang hasil wawancara. Analisis dilakukan dengan mendalami fenomena temuan hasil penelitian KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang dikorelasikan dengan temuan penelitian KPU Kabupaten Kepahiang dan hasil wawancara dengan informan penelitian untuk kemudian dielaborasi sebagai fenomena literasi politik masyarakat di Provinsi Bengkulu.

D. Gambaran Hasil Riset di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kepahiang

1. Hasil Penelitian Literasi Politik di Kabupaten Bengkulu Selatan

a. Desain penelitian

Riset literasi politik di Kabupaten dilakukan untuk mengetahui tentang seberapa tinggi tingkat literasi politik warga masyarakat dan factor-factor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya literasi politik tersebut. Tingkat literasi politik diukur dengan empat indikator, yaitu Pengetahuan tentang Politik, Pemahaman tentang Politik, Sikap dalam Berpolitik, Perilaku Politik. Sedangkan factor-factor yang mempengaruhi tingkat literasi politik diidentifikasi dari Aksesibilitas terhadap Informasi, Mobilitas, Sosialisasi Pemilu, dan Pendidikan.

Metodologi riset menggunakan metode survey yang pengambilan datanya menggunakan kuisioner pada responden yang dipilih secara acak. Sampel yang digunakan sebanyak 270 orang yang pengambilannya mempedomani table Issac-Michael, dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. Jawaban kuisioner menggunakan skala linkert (Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju dan skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju). Analisis data menggunakan desain deskriptif dengan menggunakan program Microsoft Excel dan analisis Regresi Linier Berganda menggunakan Program SPSS pada taraf kepercayaan 95 %.

b. Hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa tingkat literasi politik masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk dalam kategori 'Sedang' dengan skor 2,7. Skor tersebut diperoleh dari skor rata-rata dari skor Indikator Pengetahuan sebesar 3,3 (Sedang), skor Indikator Pemahaman sebesar 3,2 (Sedang), skor Indikator Sikap sebesar 2,2 (Rendah), dan skor Indikator Perilaku sebesar 2,7 (Rendah). Tingkat literasi politik ini tergambar dari tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 sebesar 80 % dan Pemilu Presiden 2014 sebesar 70 %.

Faktor yang mempengaruhi tingkat literasi politik warga adalah Aksesibilitas Informasi, Sosialisasi Pemilu, dan Pendidikan. Estimasi persamaan hasil riset adalah $PL=24,389+0,390AI+0,437Sos+0,180P$. Dari keempat faktor yang secara teoritis berpengaruh terhadap literasi politik, faktor Sosialisasi memiliki pengaruh terbesar terhadap perubahan tingkat literasi politik warga. Faktor kedua yang besar pengaruhnya adalah Aksesibilitas Informasi. Faktor ketiga adalah Pendidikan. Ketiga faktor tersebut memiliki kontribusi sebesar 67,3% terhadap perubahan tingkat literasi politik warga. Sedangkan faktor Mobilitas Keluar berpengaruh negatif terhadap literasi politik dengan koefisien regresi: - 0,039.

2. Hasil Penelitian Literasi Politik di Kabupaten Kepahiang**a. Desain penelitian**

Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi tentang makna dan tingkat literasi politik pada warga masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya di lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Kepahiang; mengidentifikasi model pembentukan literasi politik dan faktor yang mendorong terbentuknya literasi politik warga masyarakat; dan merumuskan rumusan masukan-masukan dalam rangka revisi kebijakandalam rangka memperbaiki kualitas literasi politik di Indonesia umumnya.

Penelitian menggunakan metode *Action Research*, yang menggunakan

model siklus Kemmis dan McTaggart (dalam Yaumi dan Damopolii, 2014) dengan tiga tahapan pokok, yaitu: (1) Pengkajian, (2) Pengkerangkaan (*reframing*), dan (3) Rekonstruksi (*re-construction*)

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik diskusi kelompok terfokus (*Focused Group Discussion/FGD*), dan wawancara. Informan dan peserta FGD terdiri dari warga masyarakat perwakilan dari elemen pemilih pemula, pemilih perempuan, kelompok penyandang disabilitas, kelompok agama, kelompok pemuka adat, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok masyarakat terdidik; unsur penyelenggara pemilu, unsur pemerintah desa / kelurahan, unsur dari organisasi masyarakat sipil / LSM.

Analisis data dilakukan menurut proses analisis simbolis, reframing struktur sosial, reframing media, rekonstruksi pengetahuan tentang Literasi Politik, dan Rekonstruksi Tindakan untuk Literasi Politik.

b. Hasil penelitian

Dalam penelitian ini, literasi politik merupakan simbol dari proses penguatan posisi rakyat pemegang kedaulatan Negara. Literasi politik bermakna: '...to liberate ...' warganegara, dan peningkatan kekuasaan rakyat. Dengan kata lain, literasi politik adalah inti dari siklus demokrasi.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat perdesaan di lokasi penelitian, politik bukanlah kebutuhan dasar yang manifest, sehingga mereka menjadi sangat pragmatis dalam menjalankan partisipasinya, termasuk penerimaan terhadap vote buying.

Pileg bukan 'pakaian' demokrasi petani dan pekebun. Ia adalah 'baju mahal' yang cocok untuk kelompok lain. Dalam hal informasi pemilu, masyarakat bergantung kepada agenda informasi politik dari Pemerintah dan Penyelenggara, sementara keduanya memiliki keterbatasan dana.

Keterbatasan pemerintah dan penyelenggara melakukan pembangunan literasi politik ini direspon oleh warga dengan cara saling belajar tentang politik. Masyarakat memenuhi kebutuhan literasi politik sendiri dengan alasan

yang cerdas, yaitu agar ‘jangan sampai tertipu’. Hal ini juga mengungkap suatu simbolisasi tentang local wisdom masyarakat; meski Pileg bukanlah kebutuhan dasar, tetapi mereka merespon fenomena yang datang.

Selama ini simbolisasi literasi politik identik dengan Pemilu dan Parpol beserta pelaksanaan Pileg, Pilkada, Pilpres, dan partisipasi pemilih. Maka tidak mengejutkan kalau luarannya adalah voter education. Jalan berpikir ini secara teori, dan kebutuhan masyarakat dari hasil studi menunjukkan adanya suatu proses reduksi. Ini membutuhkan suatu renungan kembali, adanya framing yang terjadi dalam masyarakat tentang pengetahuan politik adalah seputar isu ke-Pemilu-an, dan bukan pengetahuan politik secara luas, cukup memperhatikan. Dampaknya meluas, di mana pemahaman soal kuasa, pengaruh, fungsi-fungsi lembaga public, system dan struktur politik, keadilan akses dan kontrol, pemenuhan hak dan sebagainya bakal terkubur oleh isu Pemilu saja.

Literasi politik dipersamakan dengan sosialisasi politik, dan keduanya sering ‘dipertukarkan’. Gejala ini bagi warga menimbulkan kehilangan konteks, internalisasi yang terjadi sebenarnya hanya pada tingkat sosialisasi. Jadi pembangunan literasi politik belum ada.

Skenario agenda literasi politik belum punya bentuk. Situasi darurat selama ini menjadi justifikasi atas munculnya program-program edukasi yang sepotong-sepotong dan pragmatisme organisasi politik. Efeknya adalah terjadinya materialisasi proses Pileg sebagai representasi demokrasi. Materialisasi literasi politik menyebabkan implementasinya tidak dapat merespon solusi atas ‘praktik kotor’ di lapangan; materialisasi itu juga tidak berdampak terhadap pembentukan literasi demokrasi jangka panjang. Sebaliknya, masyarakat justru diajari pragmatism dengan menikmati pilihan *vote buying* sebagai pembenaran atas praktik demokrasi.

Dari studi ini, diidentifikasi tentang adanya ‘misleading’ tentang literasi politik dari konsep yang semestinya. Capaian pelaksanaan Pemilu diyakini

menjadi satu-satunya indikator kemajuan demokrasi Indonesia di tingkat nasional dan daerah. Apabila fenomena ini ‘membaku’, maka akan menyebabkan masa depan literasi politik makin suram, sebab target implemetasi literasi politik hanya akan bergantung pada proyek sosialisasi yang dijalankan oleh KPU dan penyelenggara Pemilu lainnya. Padahal literasi politik adalah suatu proyek besar negara untuk menguatkan posisi rakyat.

Respon terhadap ‘political illiterate’ dengan strategi memberikan voter education menjelang Pemilu, khususnya Pileg sebagai konteks studi ini, merupakan reframing yang reduktif. Kalau civic education bukan menjadi pilihan prioritas, maka penyakit transaksi suara, transaksi posisi Caleg, kecurangan suara, iliterasi politik warga, masalah kehadiran pemilih dan kenaikan jumlah golput - akan terus terjadi. Karena civic education adalah instrumen demokrasi yang dibutuhkan untuk memperkuat posisi rakyat/warganegara – yang juga posisi pemilih dalam Pemilu. Penguatan ‘politik uang’, ‘vote buying’ dan ‘transaksi suara’ adalah efek dari program literasi politik ‘tambal sulam’ yang mencerminkan bahwa pembangunan literasi politik belum disusun secara sistematis dan berkelanjutan, baik di jalur pendidikan formal maupun informal. Oleh karena itu diperlukan perbaikan melalui skema yang embedded dalam program sekolah, pendidikan tinggi, serta pendidikan yang populer di masyarakat.

Rancangan skenario literasi politik belum menemukan desain metode yang dialogis atau trilogi. Kalaupun pernah punya desain model voter education, simpul ini adalah satu spot dari siklus literasi yang berkelanjutan dari pembangunan literasi politik yang komprehensif.

Metode voter education yang dijalankan oleh penyelenggara cenderung satu arah. Metode ini menunjuk pada kepentingan, kepentingannya jelas dari si pemberi ceramah atau penyuluhan, dan bukan kepentingan warga yang membutuhkan

informasi. Metode satu arah, seperti yang dirasakan kebanyakan warga, cenderung cepat lupa – kecuali untuk arahan yang praktikal. Disfungsi dialog sulit mengantarkan warga untuk merasionalkan pengetahuan. Sehingga keyakinan lebih kuat dari pengetahuan dan pemahaman.

Kepengurusan partai politik di daerah tidak melakukan upaya literasi politik, juga tidak dalam bentuk voter education. Praktikanya, eksistensi Parpol makin tidak populer, kecuali hanya menjadi ‘perahu’ yang menghimpun orang-orang yang ingin menjadi Caleg dan mengusungnya ke KPU setempat. Menjelang Pileg masyarakat umumnya menuntut bertemu langsung dengan Caleg, mereka sebenarnya menolak bertemu dengan parpol, tim sukses, dan ‘calo’ politik. Ini memberi implikasi bahwa masyarakat pemilih justru siap dengan sistem distrik. Di mana ikatan antara Caleg sebagai calon wakil mereka di lembaga Parlemen dan pemilih terbentuk dalam suatu ‘kontrak politik’ dan kesepakatan-kesepakatan. Kebiasaan pragmatis dari Caleg yang mewakilkan pertemuannya kepada tim sukses dan “calo” inilah yang melahirkan pragmatisme masyarakat untuk menyambut transaksi suara.

Diantara kelemahan skenario pembangunan literasi politik, ada satu terobosan strategi yang bisa berkembang dan berkelanjutan, yaitu inovasi tentang pembentukan relawan demokrasi. Program relawan demokrasi bisa menjadi salah satu alternatif rekonstruksi literasi politik. Program yang dijalankan menjelang Pileg tahun 2014, misalnya, di dahului dengan penyusunan modul atau manual pelatihan, kemudian ada Training of Trainer, dan pembentukan *focal point* di Kabupaten dan desa-desa yang disebut relawan demokrasi. Secara berantai mereka melakukan *voter education* kepada masyarakat.

Kelemahan implementasi dari program relawan demokrasi itu ada dua, pertama masalah keberlanjutan, karena program itu adalah program penyelenggara dan Pemda Kabupaten, maka para relawan hanya bekerja sesuai kontrak. Kemandirian dana juga menjadi bagian kelemahan. Kedua,

model relawan demokrasi bukan asli kreasi masyarakat; semangat masyarakat dalam mengembangkan tidak kuat. Padahal model ini dapat dikembangkan di antara rentang Pemilu dilakukan sepanjang waktu, dengan perluasan tema yang lebih mendasar dari isu ke-Pemilu-an.

Saran konkrit yang diajukan berdasar studi ini antara lain: pertama, hasil dari studi ini perlu dibahas lagi sebagai bagian dari refleksi tentang konsep literasi politik, sosialisasi politik, partisipasi politik, sampai pada praktik *civic education*, *voters education*. Kedua, bila sangat sulit dan lama untuk menyusun desain literasi politik secara makro di tingkat nasional, maka Pemerintahan bersama lembaga non-Pemerintah bisa memikirkan skenario agenda peningkatan literasi politik. Bila perlu Pemerintahan bersama lembaga non-Pemerintah menyusun program literasi politik berbasis masyarakat dalam bentuk yang lebih sederhana internalisasinya, seperti teater rakyat, rejang, komik, pilihan kegiatan eks kul, dan sejenisnya. Ketiga, tidak membebankan literasi politik kepada KPU saja – sebab penguatan posisi rakyat bukan hanya tanggungjawab KPU. Keempat, hasil studi ini perlu dibahas di internal kepengurusan Parpol di daerah sebagai masukan. Parpol perlu melakukan perubahan agenda aktivisme, agar tidak hanya menghangatkan dinamika politiknya menjelang Pemilu. Kelima, Pemda Kabupaten dan penyelenggara Pemilu di daerah melakukan kerjasama jangka menengah dengan Perguruan Tinggi yang memiliki program KKN dan magang atau Bhakti Sosial dan semacamnya untuk melakukan program literasi politik.

E. Analisis

1. Relasi Hasil Penelitian di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kepahiang

Dari penelitian kualitatif, fenomena skor yang dihasilkan tersebut menunjukkan bahwa adanya keadaan anomali yang signifikan antara pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang politik dengan Sikap dan Perilaku yang ditunjukkannya. Pada satu sisi masyarakat teridentifikasi telah

memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang politik (secara teoritis). Namun pada sisi lain, diketahui pula bahwa mereka justru bertindak apatis terhadap keadaan politik itu. Secara sosiologis fenomena ini menunjukkan adanya 'pengingkaran' masyarakat terhadap pengetahuan dan pemahamannya. Karena selayaknya, semakin masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang politik sebagai sesuatu yang baik dan mereka butuhkan dalam kerangka kedudukan mereka sebagai warga negara dan dalam konteks kepentingan mereka untuk mendapatkan hak pelayanan kesejahteraan yang lebih baik, maka seharusnya mereka semakin meningkatkan partisipasinya dan bukan menunjukkan sikap apatis.

Fenomena inkonsistensi dimaksud diduga merupakan bentuk respon sosial masyarakat yang kecewa terhadap sikap dan tindakan pemimpin dan wakil rakyat yang pernah dipilihnya pada periode pemilihan sebelumnya yang dianggap mengingkari janji kampanyenya dan cenderung meninggalkan masyarakat. Pada sisi lain masyarakat akhirnya merespon dengan menggunakan suaranya secara transaksional. Secara optimistik, fenomena ini dapat dijustifikasi dengan premis : " Justru karena masyarakat telah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang politik dan pemilihan umum, maka mereka menjadi semakin dapat mengetahui dan sadar bahwa mereka telah 'diboongi' atau 'dikecewakan'. Keadaan inilah yang membuat masyarakat menjadi apatis terhadap politik khususnya dalam pelaksanaan pemilihan umum. Fenomena dimaksud telah menunjukkan bahwa justru semakin masyarakat mengerti tentang politik, semakin membuat sikap dan perilaku mereka berbanding terbalik dengan pengetahuan dan pemahaman itu.

Namun demikian, teridentifikasi pula hal yang juga menjadi anomali berikutnya dari fenomena hasil penelitian KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena apabila diduga kuat bahwa sikap dan perilaku masyarakat berbanding terbalik dengan tingkat pengetahuan dan pemahamannya tentang politik, maka seharusnya tingkat partisipasi masyarakat, khususnya *voters turned out*

menjadi rendah. Karena pada prinsipnya hal yang secara nyata dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman politik masyarakat adalah melalui sikap dan perilakunya. Berdasarkan catatan dalam laporan hasil riset KPU Kabupaten Bengkulu Selatan (2015), justru menunjukkan bahwa rata-rata tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2014 adalah 75 %. Bahka pada pileg 2014, tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan angka 80 %, yang berarti berada diatas angka rata-rata partisipasi nasional.

Penjelasan terhadap fenomena ini dapat digali dari hasil riset KPU Kabupaten Kepahiang, yang melalui metoda action research berhasil mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat perdesaan, politik bukanlah kebutuhan dasar yang manifest, sehingga mereka menjadi sangat pragmatis dalam menjalankan partisipasinya, termasuk penerimaan terhadap *vote buying*.
- b. Pengetahuan masyarakat tentang politik dan pemilu bergantung kepada agenda informasi politik yang diberikan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu, meskipun sementara keduanya memiliki keterbatasan anggaran.
- c. *local wisdom* yang berlaku di masyarakat mengindikasikan bahwa, meskipun Pileg bukanlah kebutuhan dasar, tetapi masyarakat memberikan respon atas fenomena (pileg) yang datang tersebut.
- d. Selama ini simbolisasi literasi politik hanya identik dengan Pemilu dan Parpol beserta pelaksanaan Pileg, Pilkada, Pilpres, dan partisipasi pemilih. Sehingga pemahaman masyarakat soal kekuasaan, pengaruh, fungsi-fungsi lembaga publik, sistem dan struktur politik, wacana tentang keadilan akses dan kontrol, pemenuhan hak dan sebagainya tereduksi hanya pada isu Pemilu saja.

Poin-poin temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan literasi politik yang terjadi di masyarakat sesungguhnya belum ada dan Indonesia belum memiliki skenario / agenda literasi politik dalam pengertian yang semestinya. Program-program edukasi untuk literasi politik masih sepotong-sepotong menyebabkan lahirnya

pragmatisme organisasi politik. Efeknya adalah terjadinya materialisasi proses Pileg sebagai representasi demokrasi. Materialisasi ini menyebabkan implementasinya tidak dapat merespon solusi atas ‘praktik kotor’ di lapangan; materialisasi itu juga tidak berdampak terhadap pembentukan literasi demokrasi jangka panjang. Sebaliknya, masyarakat justru diajari pragmatism dengan menikmati pilihan vote buying sebagai pembenaran atas praktik demokrasi.

Penelitian tentang literasi politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepahiang (2015) yang menjadi salah satu sumber utama studi ini menemukan adanya ‘misleading’ tentang literasi politik dari konsep yang semestinya. Target implemetasi literasi politik hanya akan bergantung pada proyek sosialisasi yang dijalankan oleh KPU dan penyelenggara Pemilu lainnya menjelang pemilihan umum saja. Padahal literasi politik adalah suatu proyek besar negara untuk menguatkan posisi rakyat. Respon terhadap ‘political illiterate’ dengan strategi memberikan voter education menjelang Pemilu, khususnya Pileg sebagai konteks studi ini, merupakan reframing yang reduktif. Kalau civic education bukan menjadi pilihan prioritas, maka penyakit transaksi suara, transaksi posisi Caleg, kecurangan suara, iliterasi politik warga, masalah kehadiran pemilih dan kenaikan jumlah golput - akan terus terjadi. Karena civic education adalah instrumen demokrasi yang dibutuhkan untuk memperkuat posisi rakyat/warga negara – yang juga posisi pemilih dalam Pemilu.

Oleh karena temuan penelitian di KPU Kabupaten Bengkulu Selatan (2015) dan KPU Kabupaten Kepahiang (2015) menemukan gejala bahwa pembangunan literasi politik belum disusun secara sistematis dan berkelanjutan, baik di jalur pendidikan formal maupun informal, maka menurut analisis mereka diperlukan perbaikan melalui skema yang embedded dalam program sekolah, pendidikan tinggi, serta pendidikan yang populer di masyarakat.

Oleh karena terdesak oleh keterbatasan waktu tahapan penyelenggaraan pemilu, metode *voter education* yang dijalankan oleh penyelenggara cenderung merupakan

informasi satu arah seperti ceramah atau penyuluhan dan sebagainya, dan belum merepresentasikan kepentingan pendidikan politik kewarganegaraan yang semestinya bagi masyarakat yang membutuhkan informasi. Metode satu arah, seperti yang dirasakan kebanyakan warga, cenderung cepat lupa – kecuali untuk arahan yang praktikal dan isfungsi dialog sulit mengantarkan warga untuk merasionalkan pengetahuan pada pemahaman yang semestinya. Sehingga keyakinan menjadi lebih kuat dari pengetahuan dan pemahaman yang semestinya.

Hasil penelitian KPU Kabupaten Kepahiang (2015) menunjukkan bahwa kepemimpinan partai politik di daerah tidak melakukan upaya literasi politik, juga tidak dalam bentuk voter education. Praktiknya, eksistensi Parpol makin tidak populer, kecuali hanya menjadi ‘perahu’ yang menghimpun orang-orang yang ingin menjadi Caleg dan mengusungnya ke KPU setempat. Menjelang Pileg masyarakat umumnya menuntut bertemu langsung dengan Caleg, mereka sebenarnya menolak bertemu dengan parpol, tim sukses, dan ‘calo’ politik. Ini memberi implikasi bahwa masyarakat pemilih justru siap dengan sistem distrik. Di mana ikatan antara Caleg sebagai calon wakil mereka di lembaga Parlemen dan pemilih terbentuk dalam suatu ‘kontrak politik’ dan kesepakatan-kesepakatan. Kebiasaan pragmatis dari Caleg yang mewakilkan pertemuannya kepada tim sukses dan “calo” melahirkan pragmatisme masyarakat untuk menyambut transaksi suara.

Program melawan demokrasi yang dilakukan oleh Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU dapat diterima sebagai salah satu alternatif rekonstruksi literasi politik yang dapat diadopsi oleh Negara dengan jaminan keberlanjutan, melibatkan elemen original native di masyarakat setempat dan perluasan tema yang lebih mendasar lebih dari sekedar isu ke-Pemilu-an. Hasil penelitian KPU Kabupaten Kepahiang juga merekomendasikan agar program literasi politik disusun berbasis masyarakat dalam bentuk yang lebih sederhana seperti teater rakyat, rejang, komik, pilihan kegiatan ekstra kulikuler di sekolah, dan sejenisnya. Program literasi

politik seharusnya tidak hanya dibenankan kepada KPU saja.

2. Edukasi Politik oleh KPU Provinsi Bengkulu sebagai Fenomena *Social Enginering*

Dari kedua penelitian yang diadakan di dua wilayah kabupaten diatas, ditemukan pengakuan bahwa KPU telah memainkan peran sebagai lembaga yang melakukan edukasi politik kepada masyarakat. Meskipun juga diidentifikasi bahwa edukasi tersebut mendorong penyempitan (reduksi) makna dari literasi politik, namun kedua penelitian tersebut mengidentifikasi hal yang sama bahwa 'informasi yang disampaikan oleh KPU telah membantu pemahaman masyarakat tentang politik dan proses demokrasi dalam konteks pemilu'. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Bengkulu sebagai informan penelitian, sebagai berikut:

"Dalam menyelenggarakan proses pemilu, KPU memang mengagendakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Secara konseptual, program ini didesain untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya terkait dengan 'event' pemilu yang akan diselenggarakan oleh KPU tersebut. Kegiatan sosialisasi adalah suatu keharusan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seluruh tahapan Pemilihan Umum yang digelar tersebut. KPU berusaha untuk menggunakan seluruh faktor dan sumber daya untuk membuat seluruh pemilih hak pilih mendapatkan informasi terkait dengan proses pemilihan yang digelar oleh KPU, baik itu pada Pileg, Pilpres, maupun Pilkada. Sementara kegiatan pendidikan pemilih menyisir kesadaran pemilih untuk memahami hak nya sebagai pemilih. Seyogyanya hal ini sudah dilakukan dari jauh-jauh hari sebelum tahapan pemilu dilakukan".

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU adalah kegiatan yang *embedded* dengan rangkaian tahapan atau proses pelaksanaan pemilu. Hal ini berarti bahwa dalam setiap pelaksanaan pemilu, KPU pasti melaksanakan kegiatan

sosialisasi. Penjelasan ini juga mengandung makna bahwa pendidikan pemilih dalam arti yang lebih luas seharusnya dilakukan tidak pada waktu yang berdekatan dengan *event* pemilu. Adapun isi informasi yang disampaikan oleh KPU dalam kegiatan sosialisasi, dijelaskan oleh informan penelitian sebagai berikut:

"Materi sosialisasi akan menyesuaikan pemilu yang akan diselenggarakan. Namun informasi yang harus menjadi konten sosialisasi oleh KPU sedera umum terdiri dari jadwal tahapan pemilu, hari dan tanggal pemungutan suara, ajakan untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih, himbauan untuk memastikan bahwa masyarakat terdaftar sebagai pemilih, petunjuk tentang cara memberikan suara seperti mencoblos atau mencontreng. Oleh karena sasaran sosialisasi bukan hanya masyarakat pemilih secara luas tetapi juga kepada para calon kontestan atau masyarakat yang berkepentingan maka kegiatan sosialisasi pemilu terkadang juga mencakup konten aturan pencalonan atau aturan-aturan baru terkait pemilu yang bersangkutan". Intinya, berkaitan dengan *what, when, where, dan how*-lah. Belum masuk mendalam ke bahasan tentang *why*; kita terkendala waktu karena saat tahapan waktunya memang ketat disamping keterbatasan anggaran juga menjadi masalah"

Dari penjelasan diatas, sangat jelas dikemukakan tentang batas-batas informasi yang diberikan oleh KPU dalam kegiatan sosialisasi pemilu yang dilakukannya. KPU teridentifikasi memainkan peranan dalam rekayasa sosial yang membuat warga negara mendatangi TPS dan menggunakan hak suaranya pada *event* pemilu. Masyarakat menjadi tahu bahwa dirinya perlu terdaftar sebagai pemilih, masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan pada proses pemberian suara dan opsi apa saja yang tersedia sebagai alternatif pilihan pada masing-masing kontestasi pemilu. Namun penjelasan ini juga menegaskan bahwa konten tentang pemahaman yang lebih lengkap tentang kewarganegeraan beserta kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara secara lebih luas memang tidak menjadi

bahasan dalam sosialisasi pemilu oleh KPU. Sehingga diperlukan aksi oleh pemerintah dan komponen negara lainnya seperti partai politik dan masyarakat sipil untuk 'mengisi' ruang edukasi politik yang lebih luas diluar hal-hal yang berkaitan dengan konteks penyelenggaraan pemilu.

Berkaitan dengan sasaran dari kegiatan sosialisasi pemilu oleh KPU, dijelaskan pula oleh informan.

"Pada dasarnya sasaran dari sosialisasi pemilu yang kita lakukan mencakup seluruh masyarakat pemilik hak pilih pada daerah pemilihan. Namun untuk kepentingan pencapaian target partisipasi pemilih yang menggunakan hak suaranya dan memperkecil terjadinya suara tidak sah, maka aksi sosialisasi pada pileg dan pilpres 2014 berikut juga pilgub, pilbup dan pilwakot tahun 2015 s/d 2018 utamanya difokuskan pada lima segmen masyarakat, yaitu : segmen pemilih pemula, segmen pemilih perempuan, segmen kelompok-kelompok keagamaan, segmen masyarakat marginal, dan segmen masyarakat penyandang disabilitas".

Penjelasan ini menegaskan kembali bahwa KPU memang mengkhususkan diri pada literasi politik yang langsung berkaitan dengan kepemiluan saja. Dan hal ini juga menguatkan hasil penelitian KPU Kabupaten Kepahiang dan hasil penelitian KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, bahwa literasi politik masyarakat di Provinsi Bengkulu masih ter-reduksi pada konteks kepemiluan saja. Oleh karenanya sangat diperlukan program yang lebih sistemik dan berkelanjutan sebagai social engineering untuk membentuk sistem pemahaman yang utuh dan komprehensif bagi seluruh masyarakat tentang konsep kewarganegaraannya.

F. Penutup

1. Simpulan

- a. Keadaan literasi politik di Provinsi Bengkulu masih sangat terbatas hanya pada literasi yang berkaitan dengan proses kepemiluan saja dan belum mencerminkan edukasi yang berorientasi pada penguatan sistem pemahaman dan aktualisasi hak dan kewajiban warga negara.

- b. Edukasi politik baru dilakukan oleh KPU melalui kegiatan sosialisasi, bintek dan pendidikan pemilih yang dilaksanakannya dalam rangka agenda tahapan pemilu yang akan digelarnya selaku penyelenggara pemilu.
- c. Negara belum memiliki program edukasi untuk peningkatan literasi politik yang sistemik dan berkelanjutan. Pemerintah dan partai politik cenderung belum melaksanakan edukasi politik yang semestinya dan masih membiarkan tugas tersebut hanya dilakukan oleh KPU saja.
- d. Kurangnya edukasi politik menuju tingkat pemahaman literasi politik yang semestinya menyebabkan pengetahuan masyarakat tentang politik tereduksi hanya pada konteks kepemiluan saja.
- e. Kekecewaan masyarakat pemilih terhadap sikap dan kinerja pemimpin dan wakil rakyat hasil pemilihan umum menimbulkan fenomena anomali dimana masyarakat diketahui memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik namun hal itu tidak konsisten dengan sikap dan perilakunya.
- f. Keadaan yang anomali dan belum adanya program yang sistemik dan berkelanjutan untuk pendidikan literasi politik masyarakat masih diyakini sebagai penyebab pendorong terjadinya pragmatisme politik di masyarakat.
- g. Dalam edukasi politik KPU berperan dalam menyampaikan informasi tentang *event* pemilu yang diselenggarakannya dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang hanya terbatas pada konteks kepemiluan saja untuk kepentingan peningkatan prosentase *voters turned out* dan penurunan prosentase suara tidak sah.

2. Saran

Mengacu pada simpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu menyiapkan program literasi politik yang secara sistemik dapat mendorong peningkatan pemahaman masyarakat tentang politik yang bersinergi dengan pemahaman tentang kewarga negaraan secara utuh.
- b. Sesuai dengan peran dan fungsinya, seharusnya Kementerian Dalam Negeri

memainkan peranannya dengan optimal untuk mendesain dan mengkonsolidasikan program *civic education* secara sistemik dan berkelanjutan untuk seluruh warga negara, dengan melibatkan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat.

- c. Partai politik dan masyarakat sipil perlu melibatkan diri bersama pemerintah dan KPU untuk memberikan edukasi untuk peningkatan literasi politik masyarakat agar tidak tereduksi hanya pada konteks kepemiluan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Ma'ruf Suha. 2014. Reformasi Birokrasi Pelayanan Prima Pemilu. Jakarta. Nusantara Publishing.
- Harun Husein. 2014. Pemilu di Indonesia Fakta, Angka, Analisis dan Studi Banding. Jakarta : Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi).
- Komisi Pemilihan Umum. 2014. Pedoman Pendidikan Pemilih. Jakarta. Komisi Pemilihan Umum.
- , 2015. Kompilasi Regulasi Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta. Komisi Pemilihan Umum
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan. 2015. Laporan Riset Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu di Kabupaten Bengkulu Selatan. Manna. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah. 2015. Identifikasi Praktik Politik Uang pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kembang Seri. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara. 2015. Perilaku Memilih (Voters Behaviour) Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Bengkulu Utara. Arga Makmur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur. 2015. Laporan Penelitian Perilaku Memilih (Voters Behaviour) Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Kaur. Bintuhan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang. 2015. Laporan Penelitian : Literasi Politik, Konsep, Reframing, dan Rekonstruksi pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Kepahiang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. 2015. Laporan Penelitian : Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih (*Voters Turn Out*) pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu.
- Titiek Kartika (editor). 2016. Penyelenggaraan Pilkada Gubernur Bengkulu 2015 : Suatu Catatan Pengetahuan Tentang Demokrasi di Daerah. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Tjahyo Kumolo. 2015. Politik Hukum Pilkada Serentak. Jakarta. Exspose (PT. Mizan Publika)